

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Siti Lailatul Maulida
204105030064
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2024**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Siti Lailatul Maulida
204105030064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2024**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Siti Lailatul Maulida
204105030064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Devi Hardianti Rukmana S.E., M.M.
NIP. 199202062020122009

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Agung Parmono, S.E., M.Si
Nip. 197512162009121002


Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M
Nip. 199112052023211022

Anggota :

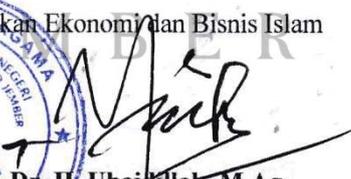
1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

2. Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Mengetahui

Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Harta rampasan (fa’i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rosulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rosul, kerabat (Rosul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rosul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumnya”. (Qs. Al-Hasyr :7)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Quran , 2015

PERSEMBAHAN

Puji syukur dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan segala puji hanya miliknya, Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan bahagia sebagai rasa syukur maka skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Untung Slamet dan Ibu Maryam yang selalu senantiasa mendoakan, memotivasi, dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir sehingga skripsi ini dapat dibuat dan terselesaikan.
2. Kakak-kakak saya Siti Maulidatul Hasanah dan Fathur Rozim yang selalu memberi dorongan semangat untuk selalu berusaha dan selalu mendoakan kesuksesan saya.
3. Suami saya Alfa Syah Barra Afsil Mubarak yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya serta selalu menemani dari awal pengajuan judul hingga sampai saat ini.
4. Teman-teman seperjuangan Program studi Akuntansi Syariah khususnya teman-teman kelas AKS 3 angkatan 2020 yang selalu memberikan masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi saya.
5. Seluruh pihak petugas UPT PPD Jember yang telah memberikan data sekaligus memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Siti Lailatul Maulida, Devi Hardianti Rukmana, 2024 : *Analisis Penerimaan Pajak air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember*

Kata kunci: Pajak Air Permukaan, Pendapatan Daerah

Pendapatan suatu negara berasal dari rakyatnya melalui suatu pemungutan maupun hasil kekayaan alam yang berada di negara tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut pendapatan utama yang dikelola berasal dari industri pajak. Fungsi pemerintahan tidak akan berjalan baik apabila masyarakat tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satu komponen yaitu pajak air permukaan sebagai suatu pendapatan daerah.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kontribusi Penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember? 2) Strategi apa yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dalam meningkatkan Penerimaan pajak air Permukaan?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kontribusi Penerimaan pajak air permukaan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. 2) Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan oleh UPT dalam meningkatkan Penerimaan pajak air Permukaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi, Keabsahan data disini menggunakan triangulasi metode dan sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kontribusi pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan daerah masih sangat kurang dalam kontribusinya jika dilihat dari hasil perhitungan kontribusinya namun dalam penerimaan pajaknya sudah sangat berkontribusi karena target yang ditetapkan relative kecil. 2) Strategi yang dilakukan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dalam meningkatkan penerimaan pajak air permukaan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara melakukan monitoring serta evaluasi dan melakukan penyuluhan dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

ABSTRACT

Siti Lailatul Maulida, Devi Hardianti Rukmana, 2024 : *Analysis of Surface Water Tax Revenue in Increasing Regional Income at the Jember Regional Revenue Management UPT*

Keywords: Surface Water Tax Revenue, Regional Income

A country's income comes from its people through collection or the proceeds of natural wealth in that country. In meeting these needs, the main income managed comes from the tax industry. The function of government will not run well if people are not aware of their obligations in paying taxes. One component is surface water tax as a regional income.

The focus of this research is: 1) How does surface water tax revenue contribute to increasing regional income in the Jember Regional Revenue Management UPT? 2) What strategies does the Jember Regional Revenue Management UPT implement to increase Surface Water Tax Revenue?

The objectives of this research are: 1) To determine the contribution of surface water tax revenues to increasing regional income in the Jember Regional Revenue Management UPT. 2) To find out the strategies implemented by UPT to increase surface water tax revenues.

This research uses descriptive research with a qualitative approach, and uses data collection techniques: 1) Observation, 2) Interviews, and 3) Documentation. The validity of the data here uses triangulation of methods and sources.

The results of this research show that 1) The contribution of surface water tax in increasing regional income is still very low in terms of its contribution if seen from the results of calculating its contribution, but in terms of tax revenue it has contributed greatly because the target set is relatively small. 2) The strategy carried out by the Jember Regional Revenue Management UPT to increase surface water tax revenues and Original Regional Revenue revenues is by monitoring and evaluating and providing counseling in collaboration with related agencies.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna dan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan

- Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 6. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 7. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E.,M.Ak selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 8. Ibu Devi Hardianti Rukmana S.E.,M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya selama proses penulisan skripsi.
 9. Ibu Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si.,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dari tahun 2020 hingga sekarang.
 10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
 11. Bapak Ismawan Taramurti, S.H., M.M selaku Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
 12. Seluruh Petugas dan Staf yang ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun semangat serta motivasi, dan diharapkan pembaca juga dapat menikmati proses pembuatannya dari awal hingga pada tahap akhir.

Jember, 1 Oktober 2024

Penulis,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

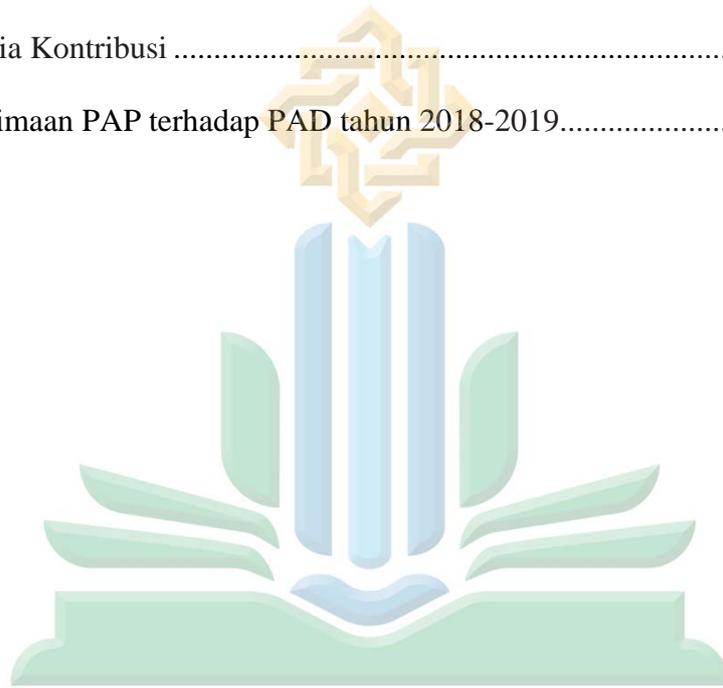
Hal

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	21

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis	54
C. Pembahasan Temuan	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matriks Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat persetujuan Izin Penelitian	
6. Surat Keterangan selesai Penelitian	
7. Jurnal Kegiatan Penelitian	
8. Dokumentasi	
9. Surat Keterangan Screening Turnitin	
10. Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
11. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

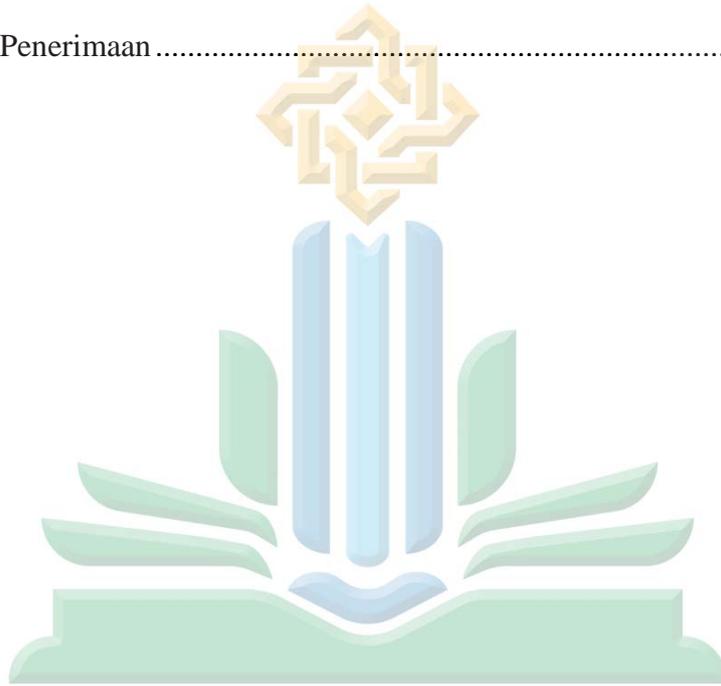
Tabel	Hal.
1.1 Data Penerimaan PAP di UPT PPD Jember dari tahun 2018-2022	4
1.2 Data Penerimaan PAD di UPT PPD Jember dari tahun 2018-2022	5
2.1 Penelitian Terdahulu	17
4.1 Kriteria Kontribusi	54
4.2 Penerimaan PAP terhadap PAD tahun 2018-2019.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
4.1 Struktur Organisasi UPT PPD Jember	51
4.2 SKPD	58
4.3 Bukti Pembayaran	58
4.4 Bukti Penerimaan	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendapatan suatu daerah/negara berasal dari rakyat yang dihasilkan dari suatu pemungutan pajak maupun dari kekayaan alam yang berada di negara/daerah tersebut. Pendapatan ini dapat membiayai kepentingan umum yang mencakup kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut pendapatan utama yang dikelola berasal dari industri pajak. Fungsi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika wajib pajak tidak sadar terhadap kewajiban dalam membayar pajak tersebut.

Di Indonesia pajak dikelompokkan berdasarkan dengan tata cara pemungutan dan pengelolaannya yang terdiri dari pajak daerah dan pajak pusat. Pajak juga berperan sebagai sumber pendapatan lokal yang dapat memaksimalkan pengeluaran daerah. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember berfungsi sebagai badan pengelola pendapatan yang berwenang untuk memungut pajak di dalam daerah tersebut.² Wajib pajak juga wajib ikut serta dalam berkontribusi terhadap pajak baik pribadi ataupun badan usaha, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan baik di negara maupun di daerah. Selain itu, dalam pengelolaan pajak juga berbeda dari yang digunakan dalam anggaran

² Nur Ika Mauliyah, Siti Lailatul Maulida, Alfa Syah Barra Afsil Mubarak, Imelda Aprilia, "Upaya Optimalisasi Pajak Air Permukaan melalui Sosialisasi Perpajakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jawa Timur", *jurnal pengabdian masyarakat dan Lingkungan*, vol.2, no.2, (2024) <http://dx.doi.org/10.30587/jpml.v2i2.6661>

pendapatan dan belanja baik negara maupun daerah. Di dalam daerah pajak dikelompokkan dalam bagian administrasi pemerintahan daerah, hal ini meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, terdapat lima jenis pajak, sedangkan kabupaten/kota memiliki sebelas jenis pajak.³

Pajak yang dikelola UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember di antaranya adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok.⁴

Beberapa pajak tersebut merupakan sumber pendapatan bagi daerah yang dapat mengoptimalkan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember adalah lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengelolaan pendapatan yang diberi wewenang dalam memungut pajak daerah. Khususnya pajak daerah yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember yaitu pajak air permukaan.

Ringkasannya pajak air permukaan diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas dilakukannya pengambilan serta pemanfaatan air

³ Tania Aprilia Ropah, Stanly W. Alexander, SyermiS. E. Mintalangi, "evaluasi penerapan perhitungan , penetapan, dan pembayaran pajak air permukaan pada upt air manado", *jurnal riset akuntansi* vol.16 no.3, (2021) :217 -226 ,<https://ejournalunsrat.ac.id/zv3/index.php/gc/article/view/36334/3382>

⁴ Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal2

permukaan seperti air sungai, air danau, air waduk, dan lainnya.⁵ Pajak ini masih tergolong salah satu pajak yang sedikit mendapat kesadaran dari wajib pajak, hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan yang diberikan oleh staf administrasi yang mengatakan bahwa dari keseluruhan perusahaan di Jember yang memiliki kewajiban membayar pajak air permukaan hanya 102 perusahaan yang sadar dan terdaftar sebagai wajib pajak air permukaan. Selain itu pada tahun 2022 target pencapaian pajak air permukaan mengalami fluktuasi/penurunan dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terkait penerimaan pajak air permukaan. Analisis ini tidak hanya mencakup aspek jumlah penerimaan, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti sistem akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan pajak, serta efektivitas administrasi perpajakan. Dengan memahami seluk-beluk penerimaan pajak, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan PAD secara keseluruhan.

Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan di Daerah Jember dalam periode 2018-2022 menunjukkan kecenderungan untuk melebihi target yang ditetapkan. Target paling tinggi tercatat ditahun 2022, yaitu Rp 425.000.000, dan realisasi yang diterima mencapai Rp 843.533.850. Sementara itu, target yang paling rendah berada ditahun 2018, yaitu sebesar Rp 370.907.000, dan realisasi yang diterima sebesar

⁵ Peraturan Gubernur Jawa Timur. Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, pasal 2

Rp 542.344.300. tahun demi tahun UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah mengalami fluktuasi/penurunan dalam target penerimaan pajak air permukaan.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak Air Permukaan di UPT PPD Jember dari tahun 2018-2022

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	370.907.000	542.344.300	146,22%
2019	428.000.000	591.203.550	138,13%
2020	450.000.000	545.694.900	121,27%
2021	458.000.000	566.963.200	123,79%
2022	425.000.000	843.533.850	198,48%

Sumber : UPT PPD Jember

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember menetapkan target pencapaian tahun 2022 lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya karena berdasarkan keterangan dari pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini terjadi karena dampak dari kejadian Covid, sehingga penetapan target menjadi lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari pertumbuhan di atas Penerimaan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Jember seharusnya mampu menggali kemampuan baru yang dapat berkontribusi pada penerimaan pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Di samping itu, penerimaan pajak air permukaan memiliki implikasi yang lebih luas bagi pembangunan daerah. Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti

infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara penerimaan pajak dan pembangunan daerah serta melihat bagaimana pajak air permukaan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jika ditinjau lebih mendalam permasalahan yang terjadi di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember terdapat pada kesadaran wajib pajak yang masih tergolong rendah sehingga membutuhkan upaya pemungutan pajak yang harus dilakukan oleh petugas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Tabel 1.2
Data Penerimaan PAD di UPT PPD Jember dari tahun 2018-2022

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2018	269.270.597.000	343.022.374.967	127,39%
2019	324.514.000.000	360.892.668.675	111,21%
2020	259.838.000.000	302.991.840.360	116,61%
2021	295.759.000.000	334.575.117.710	113,12%
2022	298.382.000.000	354.372.737.708	118,76%

Sumber : UPT PPD Jember

Dalam meningkatkan pendapatan daerah pemerintah juga dapat berperan dalam meningkatkan PAD, baik dalam bentuk penerapan maupun kebijakan yang telah diterapkan.⁶ Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa pencapaian PAD jember selalu melebihi target pencapaian walaupun pada target PAP sendiri mengalami penurunan target. Dalam

⁶ Nur Ika Mauliyah, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini Muhammad Raziv Aulia Effendi, "Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember", *jurnal ekonomi bisnis manajemen dan akuntansi*, Jil.2, No.1, (2023) <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i1.108>

Pasal 2 dalam Pergub no 47 tahun 2018 UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tugas yaitu melakukan kegiatan dalam bidang teknis operasional yaitu pengumpulan pendapatan daerah, tatausaha, dan pelayanan masyarakat. Salah satu fungsinya adalah melakukan pengumpulan pajak air permukaan yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Raihana Zalikhah menunjukkan efektivitas dalam penerimaan PAP dalam meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rata-rata keseluruhan berdasarkan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat per wilayah sebesar 232%, yang dapat dikatakan sangat efektif. Dalam kontribusi penerimaan pajak air terhadap peningkatan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan rata-rata presentase sebesar 0,0110%, yang termasuk dalam kategori tidak berkontribusi.⁸ Sementara itu, penelitian Crispim P. Leo Soro mengungkapkan bahwa secara signifikan pajak air permukaan berpengaruh terhadap pajak daerah. Dengan demikian, jika pajak air permukaan meningkat maka pendapatan daerah juga mengalami peningkatan.⁹

⁷ Peraturan Gubernur Jawa Timur. Nomor 47 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi, Pasal 5

⁸ Nur Raihana Zalikhah, dkk, "Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Dan Kontribusinya Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Tengah" *jurnal kolboratf Sains* vol 6, (2023) 773-788

⁹ Crispim P. Leo Soro "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Air Permukaan Dan Produk Domestic Regional Bruto Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah" *jurnal ilmu management terapan* vol 4 No.5 (2023), <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i5>

Berdasarkan uraian diatas serta mengingat pentingnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, sehingga hal ini menarik untuk dilakukannya penelitian dengan judul “Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember?
2. Strategi apa yang akan dilakukan oleh UPT PPD Jember dalam meningkatkan Penerimaan pajak air Permukaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerimaan pajak air permukaan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
2. Untuk mengetahui Strategi apa yang dilakukan oleh UPT dalam meningkatkan Penerimaan pajak air Permukaan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan mengenai tentang pajak air permukaan dan PAD

2. Secara Praktis

- a. Penulis, Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu penulis memahami lebih banyak tentang pajak air permukaan.
- b. Perguruan tinggi, hasil temuan dalam penelitian ini dapat menjadi sebagian bahan referensi bagi para peneliti berikutnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
- c. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemandu dalam proses kemajuan perusahaan. Mereka juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan yang bermanfaat saat mengevaluasi kinerja UPT PPD Jember.

E. Definisi Istilah

Hal ini dapat menghindari kesalahpahaman mengenai istilah yang peneliti maksud, dan definisi istilah ini memiliki makna yang menjelaskan istilah-istilah penting dan juga menjadi fokus dalam penelitian di dalam judul penelitian.¹⁰ Yang mana istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Akuntansi Perpajakan

Menurut M. Yasser Arafat menyatakan akuntansi perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan dan pengendalian transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Karena akuntansi perpajakan juga

¹⁰ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : IAIN Jember, 2020), 91

berfungsi untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.¹¹

2. Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai perubahan yang ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 menyatakan ketentuan umum dan tata cara dalam perpajakan, pasal 1 ayat 1 juga menyatakan bahwa pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh perorangan atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan untuk kemakmuran rakyat dalam pembiayaan rumah tangga negara, yang dimaksudkan yaitu pembayaran pajak.¹²

3. Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi pemerintah yaitu Pendapatan Daerah menunjukkan tolak ukur dalam menilai perkembangan ekonomi daerah baik kabupaten ataupun kota. Nilai pendapatan daerah sangat bergantung pada kualitas pajak atau kapasitas perpajakan dalam daerah tersebut. Pajak daerah seperti PKB, BBNKB, pajak hotel dan restoran, biaya reklame, dan keuntungan dari biaya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sumber pendapatan daerah.

Seberapa banyak pajak yang diterima daerah menunjukkan seberapa banyak pula aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah tidak

¹¹ Khas Sukma Mulya, "Akuntansi Perpajakan", Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023

¹² Mardarismo, "Perpajakan", Yogyakarta: 2023, 3

dapat mengembangkan PAD sampai ekonomi bergerak. Kemampuan pendanaan merupakan masalah besar dalam pembangunan daerah yang masih bergantung pada Dana Alokasi Umum untuk menutupi kebutuhan mereka.¹³

4. Penerimaan Pajak Air Permukaan

Jika Penerimaan pajak dari pajak air permukaan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin maka pendapatan daerah akan semakin meningkat. Hal yang dapat dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak air yaitu melakukan penagihan terhadap wajib pajak terkait. Dasar pengenaan pada pajak air permukaan yaitu pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dalam nilai perolehan air permukaan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan menggambarkan alur yang di jelaskan dalam skripsi, dari bab I yaitu pendahuluan dan berakhir bab V yaitu penutup, yang mencakup:

Bab I memulai dengan pendahuluan yang menjelaskan konteks penelitian, fokus, tujuan dan manfaat dalam penelitian. Pada bagian ini juga menjelaskan definisi istilah yang digunakan dalam membahas secara sistematis.

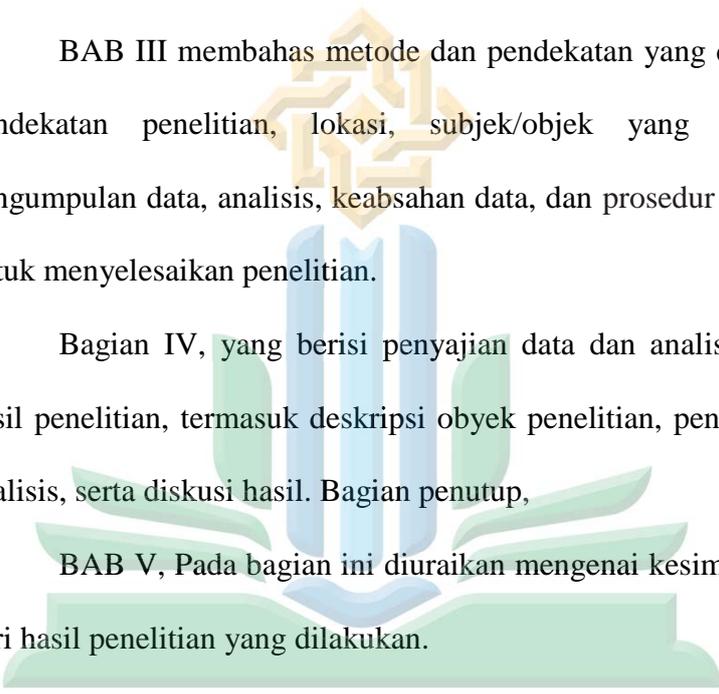
¹³ Afni Nooraini & Afif Syarifuddin Yahya. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)”. *Jurnal Keuangan Dan ekonomi public*. Vol 5 no 2. (2018) <https://doi.org/10.33701/je%20&%20kp.v5i2.416>

BAB II Pada bagian ini menyajikan teori-teori yang mendukung mengenai pajak daerah, pajak air permukaan, dan pendapatan daerah untuk dasar memperkuat teori dalam penelitian kemudian disusun dalam kerangka pemikiran dan referensi dari penelitian-penelitian yang terdahulu.

BAB III membahas metode dan pendekatan yang digunakan, jenis pendekatan penelitian, lokasi, subjek/objek yang diteliti, teknik pengumpulan data, analisis, keabsahan data, dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian.

Bagian IV, yang berisi penyajian data dan analisis, menjelaskan hasil penelitian, termasuk deskripsi obyek penelitian, penyajian data, dan analisis, serta diskusi hasil. Bagian penutup,

BAB V, Pada bagian ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan penelitian terdahulu yang dipakai sebagai acuan dalam mendukung penyusunan penelitian ini :

1. Penelitian Niken Anggraeni Pangesti yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah”.

Berfokus pada pengaruh PKB, BBN-KB, dan PAP secara bersamaan-bersamaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.¹⁴

2. Penelitian Putri Delima, Rismansyah, Nurmala yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.

Menejelaskan bahwa penelitian ini menyelidiki pengaruh penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

¹⁴ Niken Anggraeni Pangesti,” Pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah”(skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020) 1-102

pada BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan selama periode pengamatan 2016–2020. Hasilnya, berdasarkan nilai t total 29,609 dan tingkat signifikansi 0,000–0,05, menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Air Permukaan berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah.¹⁵

3. Penelitian Rahma Deviana Wiangga, Euis Hernawati yang berjudul “Peranan Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda II Soreang”.

Berfokus pada peranan pemungutan pajak air permukaan di Bapenda II Soreang. Hasil penelitian ini penerimaan pajak air permukaan dan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi.¹⁶

4. Penelitian Andi Jam'an, Rustan, Siti Fatimah Maulana yang berjudul “Potensi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”.

Menjelaskan bahwa penelitian ini meneliti terkait potensi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Air Tanah memiliki

¹⁵ Putri Delima, Rismansyah, Nurmala, “Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, vol 4 No 3 (2022), <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7866>

¹⁶ Rahma Deviana Wiangga, Euis Hernawati “Peranan Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda II Soreang”, *Journal of economic and Business Studen* vol 1 No 2 (2022), <https://journal.piksi.ac.id/index.php/jebs/article/view/790>

presentase yang sangat baik dan akan terus meningkat karena jumlah yang dilaksanakan melebihi potensinya.¹⁷

5. Penelitian Wulan Saputri Litiani yang berjudul “Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bapenda Cikokol Tahun 2019-2021”.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengumpulan pajak air permukaan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tangerang. Penelitian ini juga akan menyelidiki hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan untuk meningkatkan PAD dari tahun 2019 hingga 2021. Penelitian juga akan menyelidiki solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian bisa saja menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah mengalami kontribusi pajak air permukaan sebesar 87% pada 2019, 106% pada 2020, dan 100,7% pada 2021.¹⁸

6. Penelitian Maura Yuanitha, Meidy Lieke Karundeng yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan”.

Menjelaskan bahwa penelitian ini terfokus pada kontribusi PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan di Provinsi Jawa Barat.

¹⁷ Andi jam'an, Rusran, Siti Fatimah Maulana, "Potensi Pajak Air Tanah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros," jurnal ekonomi dan Bisnis, vol 5 No 1 (2022):81-88 <https://doi.org/10.31850/economos.v5i1.1644>

¹⁸ Wulan saputri Listiani, dkk, "Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bapenda Cikokol Tahun 209-2021", jurnal Ilmu administrasi Publik, vol 2 no 5 (2022), <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i5.2965.g1412>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB berpengaruh cukup baik terhadap PAD, BBNKB tidak terlalu memengaruhi terhadap PAD, PBBKB berpengaruh kurang baik terhadap PAD, dan PAP sangat kurang berpengaruh terhadap PAD.¹⁹

7. Penelitian Vina Robi Nawawiyah, R.Deden Adhianto yang berjudul “Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Bapenda P3DW Rancaekek”.

Menjelaskan bahwa penelitian ini meneliti bagaimana pajak air permukaan memengaruhi pendapatan asli daerah di Bapenda Rancaekek. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pajak air permukaan memengaruhi pendapatan asli daerah.²⁰

8. Penelitian Siti Julaiha, Aiat Sudraiat yang berjudul “Analisis Pengawasan Pajak Air Tanah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2018-2020”.

Menjelaskan bahwa penelitian ini terfokus pada pemantauan lahan pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jakarta.

¹⁹ Maura Yuanitha, Meidy Lieke Karundeng “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan”, *Journal of Economic and Business Studies* vol 12 No 6 (2023), <https://doi.org/10.52644/joeb.v2i6.740>

²⁰ Vina Robi Nawawiyah, R.Deden Adhianto (2023) “Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Bapenda P3DW Rancaekek”, *Journal of Economic and Business Studies* vol 2 No 2 (2023), 66-72, <https://journal.piksi.ac.id/index.php/jeb/article/view/1227>

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan pajak air tanah sudah memadai.²¹

9. Peneliti Dwi Ihsan Wijoyo yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode 2018-2021”.

Penelitian ini meneliti bagaimana penerimaan pendapatan asli daerah dan kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah di provinsi jambi dari tahun 2018 hingga 2021. Hasilnya menunjukkan bahwa, karena nilai pendapatan asli daerah yang sangat kecil, penerimaan PKB dan pajak air permukaan tidak berdampak.²²

10. Penelitian Fuji Nurlaela, Euis Hernawati yang berjudul “Pengaruh Pajak air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi Periode 2018-2022”.

Fokus penelitiannya adalah pengaruh pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Bapenda Sukabumi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemungutan sudah dilakukan dengan baik namun masih terdapat beberapa hambatan yang dialaminya.²³

²¹ Siti Julaiha, Aiat Sudraiat “Analisis Pengawasan Pajak Air Tanah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2018 – 2020”. Jurnal Ilmu Administrasi Publik vol 3 No 3 (2023) <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.3159.g1510>

²² Dwi Ihsan Wijoyo, “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode 2018-2021”. Jurnal Ekonomi akuntansi, vol 1 No 3 (2023): 52-58, <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i3.424>

²³ Fuji Nurlaela, Euis Hernawati “Pengaruh Pajak air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi Periode 2018-2022”, journal of economic and Business Studen vol 2 No 2 (2023), <https://www.journal.piksi.ac.id/index.php/jebs/article/view/1225>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Niken Anggraeni Pangesti	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah	Persamaan pada penelitian ini yaitu objek penelitiannya yaitu pajak air permukaan dan Pendapatan asli daerah.	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.
2.	Putri Delima, Rismansyah, Nurmala	Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Persamaan pada penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu pajak air permukaan dan Pendapatan asli daerah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.
3.	Rahma Deviana Wiangga, Euis Hernawati	Peranan Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda II Soreang.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti tentang pajak air permukaan dan pendapatan asli daerah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat dilakukannya penelitian

4.	Andi Jam'an, Rustan, Siti Fatimah Maulana	Potensi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama sama meneliti pajak air tanah terhadap Pendapatan asli Daerah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada lokasi dilakukannya penelitian.
5.	Wulan Saputri Litiani	Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bapenda Cikokol Tahun 2019-2021.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objeknya yaitu pajak air permukaan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi dan tahun yang digunakan untuk bahan penelitian.
6.	Maura Yuanitha, Meidy Lieke Karundeng	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pajak air permukaan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini terfokus pada 4 variabel sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya 1 variabel.
7.	Vina Robi Nawawiyah, R.Deden Adhianto	Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Bapenda P3DW Rancaekek.	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode partisipasi

				dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.
8.	Siti Julaiha, Aiat Sudraiat	Analisis Pengawasan Pajak Air Tanah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2018 – 2020.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada focus penelitiannya yaitu pada penelitian ini hanya terfokus pada peantauan lahannya saja sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan terfokus pada bagaimana kontribusi pajak air permukaan terhadap PAD.
9.	Dwi Ihsan Wijoyo	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaran Bermotor dan Pajak Air Permukaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode 2018-2021.	Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pajak air permukaan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini terfokus pada 2 variabel yaitu Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak Air Permukaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan 1 variabel yaitu Pajak Air Permukaan dan penggunaan metode penelitiannya pada penelitian ini menggunakan

				kuantitatif sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan kualitatif.
10.	Fuji Nurlaela, Euis Hernawati	Pengaruh Pajak air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi Periode 2018-2022.	persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama akan meneliti tentang pajak air permukaan dan pendapatan asli daerah.	Perbedaan penelitian ini dengan dengan peneliian yang akan dilakukakan adalah metode penelitiannya yaitu kuantitatif sedangkan pada penlitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.

Sumber : Data di olah oleh penulis

Tabel 2.1 dengan mempertimbangkan perbedaan serta persamaan dalam penelitian yang dilakukan pada saat ini dan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menarik dalam membahas pajak air permukaan dan pendapatan daerah. Pada hasil *reviewer* terdapat perbedaan dan persamaan metode yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Adapula kesamaan dan pembeda pada penelitian terdahulu yaitu dalam mengumpulkan data yang digunakan pada saat observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta adapula yang menggunakan populasi dan sampel. Perbedaan yang terakhir terdapat pada lokasi dilakukannya proses penelitian.

B. Kajian Teori

1. Konsep Akuntansi

Akuntansi merupakan ilmu yang terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi keuangan. Perkembangan tersebut menempatkan akuntansi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari roda pemerintahan dan dunia usaha.²⁴ Pura menyatakan bahwa akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa yang berupa informasi keuangan dari suatu organisasi.²⁵ Informasi tersebut dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Karena informasi akuntansi pada dasarnya menyajikan informasi terkait ekonomi kepada pihak yang memerlukan. Adapun pihak yang memerlukan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 2 yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan dan karyawan, sedangkan pihak eksternal merupakan pihak pemegang saham, dan pemerintah.

a. Keterhubungan Pajak dengan Akuntansi

Perpajakan dan akuntansi memiliki hubungan yang saling mendukung dan berkaitan sangat erat dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki usaha dengan omset per tahun lebih dari 4,8 miliar diwajibkan untuk melakukan pembukuan.

²⁴ Stephanie selina sheren wowor, "evaluasi penerapan akuntansi pajak air permukaan pada perusahaan daerah air minum kabupaten minahasa utara", *jurnal riset akuntansi going concern*, vol 12 no 1, 2017

²⁵ Pura rahman, *Pengantar akuntansi 1*, penerbit erlangga, Jakarta, 2013

Sedangkan wajib pajak yang memiliki usaha dengan omset kurang dari 4,8 miliar diperbolehkan melakukan pencatatan. Wajib pajak yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar diperbolehkan melakukan pencatatan karena untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung hasil usahanya dan mempermudah wajib pajak dalam menghitung berapa pajak terutang yang harus dibayarkan nantinya. Perhitungan penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak harus berdasarkan oleh Standar Akuntansi Keuangan. Tujuannya agar pembukuan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.²⁶

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunita pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang dapat melakukan penyusunan laporan keuangan dengan benar dan tepat maka akan mempermudah menghitung jumlah pajak terutang perusahaan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.²⁷

²⁶ Ninda Safitri, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Perpajakan Serta Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan", Skripsi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Perbanas Surabaya, 2018.

²⁷ Yunita Eriyanti Pakpahan. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Jom Fekon*, 2(1), 2015.

b. Fungsi Akuntansi Perpajakan

- 1) Mencatat transaksi keuangan, fungsi utamanya adalah mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengenaan pajak.
- 2) Pengukuran pajak, akuntansi perpajakan disini berfungsi untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3) Pelaporan pajak, dalam hal ini akuntansi perpajakan juga berfungsi untuk menyajikan laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak secara periodic.
- 4) Pengendalian pajak, akuntansi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa pengenaan pajak dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 5) Perencanaan pajak, akuntansi perpajakan dapat membantu baik perusahaan maupun individu dalam perencanaan pajak dengan memberikan informasi yang relevan mengenai pajak yang harus dibayarkan.²⁸

2. Konsep Pajak

Pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar terhadap negara baik yang terutang oleh orang individu maupun badan usaha

²⁸ Khas Sukma Mulya, "Akuntansi Perpajakan", Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, 1-2

yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, karena hal ini digunakan untuk keperluan negara dan memakmurkan rakyatnya".²⁹

Pajak diartikan sebagai wajib bayar kepada pemerintah dan merupakan tindakan paksaan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak secara langsung menguntungkan individu, dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat tidak untuk kepentingan pribadi. Pajak juga dapat dikatakan sebagai pembagian kekayaan dari rakyat ke kas negara dalam membiayai belanja negara, dan sisanya digunakan untuk kesejahteraan publik.³⁰

Dengan mempertimbangkan definisi pajak sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber dana utama bagi negara. Pada akhirnya, kepentingan umum dapat didanai, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak yang dipungut dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui tersedianya layanan dan fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

- a. Fungsi pajak dibedakan menjadi 2 yaitu: fungsi budgetair dan fungsi mengatur.

²⁹ Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1

³⁰ Hamidah, Junaidi, dkk, *Perpajakan* (Batam:2023) 28

- 1) Fungsi Budgetair merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan.³¹
- 2) Fungsi mengatur yang merupakan alat untuk mengatur pemerintahan dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya pajak terhadap minuman keras, dan pajak barang mewah.

Nilai-nilai yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267 juga menentukan pemungutan pajak ini.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيطَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”. (Qs. Al-Baqarah : 267)³²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ayat di atas membahas perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian dari harta mereka untuk kepentingan Allah SWT. Dengan begitu ayat ini memiliki persamaan dengan ide tentang pajak, yaitu memenuhi kebutuhan negara dalam mencegah kerugian negara dan didasarkan pada masalah mursalah, yang bertujuan untuk mencapai kekayaan yang

³¹ Mardiasmo, "Perpajakan edisi terbaru", Yogyakarta:2023

³² Al-Quran Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Quran , 2015

adil dan menjaga kesejahteraan umum. Jadi harta negara bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya orang kaya.

b. Teori Pemungutan Pajak

1) Teori Asuransi

Teori menjelaskan terkait keselamatan jiwa, properti, dan hak-hak warga negara yang dilindungi. Akibatnya masyarakat harus membayar pajak yang dianggap sebagai premi asuransi karena mereka mendapatkan asuransi perlindungan.³³

2) Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan mengenai pembagian beban pajak yang telah didasarkan terhadap kepentingan masing-masing orang, seperti perlindungan dalam negara. Semakin besar kepentingan seseorang dalam negara maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayar.³⁴

3) Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, pajak wajib dibayarkan dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, yang berarti bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama. Ada dua cara untuk mengukurnya, yaitu:³⁵

a) Unsur Objektif, yang mengacu pada jumlah uang yang diterima seseorang dan

³³ Mardiasmo, "Perpajakan edisi terbaru", Yogyakarta:2023

³⁴ Mardiasmo, "Perpajakan edisi terbaru", Yogyakarta:2023

³⁵ Mardiasmo, "Perpajakan edisi terbaru", Yogyakarta:2023

b) Unsur Subyektif, yang mengacu pada jumlah kebutuhan material yang harus dipenuhi seseorang

4) Teori Bakti

Hubungan antara negara dan rakyat menentukan dasar keadilan dalam pemungutan pajak. Sebagai rakyat yang baik, masyarakat harus selalu menyadari kewajibannya dalam membayar pajak.³⁶

5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini berdasarkan pada keadilan yang mana bergantung pada pemungutan pajak, yang berarti bahwa pajak diambil dari daya beli rumah tangga untuk digunakan oleh negara kemudian, negara akan memberikan kembali uang tersebut kepada masyarakat melalui program kesejahteraan. Oleh karena itu kepentingan seluruh masyarakat akan diutamakan.³⁷

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Self assessment*

Self-assessment dikatakan sebagai sistem pemungutan yang memberi petugas pajak (fiskus) wewenang untuk menentukan besarnya kisaran pajak terutang oleh wajib pajak (WP). Ciri-cirinya adalah:

a) Petugas pajak (fiskus) memiliki wewenang dapat menentukan besarnya pajak terutang oleh WP.

³⁶ Mardiasmo, "Perpajakan edisi terbaru", Yogyakarta:2023

³⁷ Mardiasmo, "Perpajakan edisi terbaru", Yogyakarta:2023, 6

- b) Sifat wajib pajaknya pasif dan harus diterima.
- c) Utang pajak akan muncul setelah dikeluarkan surat penetapan pajak oleh petugas.

2) *Official assessment*

Official assessment yaitu sistem yang melakukan pemungutan pajak dan memungkinkan wajib pajak untuk memilih sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak sendiri memiliki otoritas untuk menentukan besarnya pajak terutang;
- b) Wajib pajak dapat menghitung, melakukan penyetoran, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- c) Petugas pajak tidak dapat melakukan *intervensi* dan hanya melakukan pengawasan.

3) *Withholding system*

Withholding system yaitu sistem dilakukannya pemungutan yang telah diberikan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) dalam melakukan pemotongan atau pungutan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki dua ciri:

- a) wewenang untuk melakukan pemotongan atau pungutan pajak terutang ada pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan).³⁸

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Peneganaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya penghasilan dalam suatu tahun dianggap sama dengan tahun tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan dalam stelsel disini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

³⁸ Mardiasmo, "Perpajakan edisi terbaru", (Yogyakarta:2023), 11

c. Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antar stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.³⁹

4. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan suatu kewajiban terhadap daerah yang terutang oleh individu atau badan yang memaksa berdasarkan peraturan undang-undang. Pajak ini tidak dikembalikan secara langsung melainkan digunakan untuk kebutuhan daerah dan kesejahteraan rakyatnya.⁴⁰

a. Jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan pada semua kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh motor atau peralatan lainnya sebagai tenaga penggerak.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pajak yang dikenakan pada hak milik kendaraan yang diberikan kepada

³⁹ Mardiasmo, "Perpajakan edisi terbaru", (Yogyakarta:2023)

⁴⁰ Peraturan Gubernur Jawa Timur. No 13 tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dan pajak daerah, pasal 1 ayat 8

pihak yang melakukan transaksi seperti penjualan, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam perusahaan.

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pengenaan pajak atas penggunaan bahan bakar cair, gas, dan padat yang digunakan oleh kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan (PAP) pajak yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, atau semua jenis air di atas permukaan tanah. Air laut, baik di daratan maupun di laut, tidak termasuk dalam kategori ini.
- 5) Pajak Rokok adalah cukai yang dipungut oleh pemerintah atas rokok.⁴¹

5. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan dikenakan atas penggunaan dan pengambilan air permukaan. Pajak air permukaan juga dikatakan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, termasuk semua jenis air di permukaan tanah, baik di darat maupun di laut, menurut peraturan gubernur Jawa Timur.⁴²

a. Objek dan Subyek Pajak Air Permukaan

Menurut Bapenda Jatim, yang menjadi objek dari pajak air permukaan adalah :

⁴¹ Peraturan gubernur Jawa Timur. No 9 tahun 2010 tentang pajak daerah, pasal 1 ayat 9-22

⁴² Peraturan Gubernur Jawa Timur. No 11 tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan, pasal 1

- 1) Pengambilan air permukaan
- 2) Pemanfaatan air permukaan
- 3) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Sedangkan pengecualian dari objek pajak air permukaan yaitu:

- 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air untuk keperluan rumah tangga.
- 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat.
- 3) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Subyek PAP adalah orang pribadi atau kelompok yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dianggap sebagai subjek pajak PAP, sedangkan yang wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.⁴³

Dengan begitu setiap orang yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah subjek pajak. Selain itu, setiap subjek wajib melaporkan dan mendapatkan izin gubernur, disesuaikan atas peraturan undang-undang yang berlaku, dalam melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

⁴³ Peraturan Daerah Jawa Timur, <https://bapenda.jatimprov.go.id/p/pembayaran-pap>

b. Penerimaan Pajak Air Permukaan

Penerimaan pajak air permukaan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah jika dilakukan dengan baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Jember untuk meningkatkan penerimaan pajak air permukaan antara lain:

- 1) Melakukan proyeksi penerimaan pajak air permukaan berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Melakukan penagihan pajak secara periodik atau berkelanjutan yang disepakati bersama dengan perusahaan.
- 3) Turun langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan pajak dan melakukan sidak terhadap perusahaan yang melanggar.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan penerimaan pajak air permukaan yang berada di UPT Pengelolaan

Pendapatan Kabupaten Jember dapat meningkat dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

c. Dasar Pengenaan Pengambilan dan Pemanfaatan PAP

Nilai perolehan air permukaan digunakan sebagai dasar untuk membayar pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak adalah penggunaan air untuk bidang kegiatan usaha yang meliputi:

- 1) Industri pengolahan.
- 2) Pertambangan non minyak bumi dan non migas alam.

- 3) Perkebunan.
- 4) Perikanan.
- 5) Peternakan.
- 6) Perhotelan, penginapan, rumah perawatan komersial, dan sejenisnya.
- 7) PDAM
- 8) Rumah sakit dan lainnya.

Nilai ini ditunjukkan dalam rupiah dan dihitung berdasarkan sebagian atau seluruh faktor. Faktor-faktor yang dihitung besarnya nilai perolehan air adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis air sumber
- 2) Lokasi air sumber
- 3) Tujuan dari dilakukannya pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- 4) Volume air yang digunakan dan diambil
- 5) Kualitas air
- 6) Luas area air yang mana air diambil dan dimanfaatkan
- 7) Tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air.

Tarif pajak air permukaan sebesar 10% ditetapkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2001 tentang pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah maupun air

permukaan. Pajak ini dipungut di wilayah di mana air permukaan diambil dan dimanfaatkan.⁴⁴ Masa pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah dengan jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender.

Air permukaan di Jember sebagian besar diambil dan dimanfaatkan dari bantaran air sungai yang melintasi wilayah tersebut. Akibatnya, semua peruntukan tersebut dikenakan pajak atas pemanfaatan air. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 tahun 2010 mengatur penggunaan air permukaan di Kabupaten Jember yang berada di bawah naungan UPT. Peraturan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Industri.
- 2) Perusahaan Air Minum.
- 3) Perusahaan Perkebunan.
- 4) Penggelontoran dan mesin pendingin, pengisian pemandian/kolam ikan, pencucian dan peternakan.
- 5) Pembangkit listrik PT. PLN

Setiap perusahaan yang dialokasikan pada pajak air permukaan memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan pajak air permukaan dan PAD. Oleh karena itu, peran pajak air permukaan sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan di daerah tingkat 1 bergantung pada bagaimana sistem pelaksanaannya.

⁴⁴ Peraturan Gubernur Jawa Timur, No. 16 Tahun 2001. tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

d. Perhitungan Nilai Pajak air permukaan

Pajak Air Permukaan dipungut berdasarkan dari Peraturan Daerah. Perhitungan Nilai dari Pajak Air Permukaan adalah dengan mengalikan tariff pajak yaitu tarif pajak permukaan yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak tersebut.

Pajak Air Permukaan – Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Perhitungan pajak air permukaan harus dilihat tata cara yang diperlukan dalam perhitungan tersebut. Adapun tata cara dalam perhitungan pajak air permukaan:

- 1) Diketuainya jumlah volume air yang dipakai oleh wajib pajak dalam satuan kubik. Hal ini sangat penting diketahui dalam perhitungan pajak air permukaan.
- 2) Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan. Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai acuan dalam perhitungan pajak air permukaan dan dapat dinyatakan dalam rupiah. NPA di tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan kebijakan gubernur provinsi. Untuk tariff perhitungan paak air permukaan ditetapkan sebesar 10%.⁴⁵

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dikatakan pendapatan yang berasal dari suatu daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan undang-undang

⁴⁵ Peraturan gubernur 68 tahun 2017 tetang alat ukur air dan penetapan volume

yang berlaku sebagai bagian dari desentralisasi PAD, yang bertujuan untuk memberi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

Otonomi daerah berarti bahwa sebuah wilayah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola masyarakatnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi hak dan wewenang untuk mengumpulkan sumber daya keuangan yang sebesar-besarnya dengan fokus pada pendapatan daerahnya sendiri.⁴⁶

Dengan mengingat bahwa pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber ekonomi daerah, dan setiap pemerintah daerah diharapkan mampu membangun infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri. Pendapatan asli daerah didapatkan dari hasil dari setoran pajak, retribusi milik, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber lain yang dianggap sebagai pendapatan asli yang sah. Karena pendapatan asli daerah sudah diatur dalam undang-undang dan tujuan pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk penagihan, pengertiannya tidak lagi bersifat intrusif.⁴⁷

⁴⁶ Devi Harahap, “analisis kontribusi dan efektifitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah koya pematangsiantar”, *jurnal Ekonomi Pembangunan* vol 6 No1 (2024) <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v6i1.1103>

⁴⁷ Agus Kanjuni, Heru Cahyono, Rizki Apriliawati.”Pengelolaan pasar terhadap Pendapatan asli daerah”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.vol 5 no 1 (2024) 105-119 <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur>

7. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

a. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh entitas atau individu yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa menerima imbalan secara langsung karena digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

Menurut undang-undang, pemerintah dapat melakukan penarikan pajak daerah. Jika wajib pajak tidak membayarnya mereka akan dianggap sebagai utang pajak, dan mereka akan dikenakan denda administrasi. Jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berbeda seperti berikut:

1) Pajak Daerah Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Alat Berat (PAB)
- d) Pajak Atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- e) Pajak Air Permukaan (PAP)
- f) Pajak Rokok
- g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
- c) Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Air Tanah
- f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MLB)
- g) Pajak Sarang Burung Walet
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pungutan tambahan pajak untuk kepentingan kas daerah

disebut Opsen Pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada proses, dilihat melalui hubungan antar variabel yang membentuk suatu objek yang diteliti. Karena penelitian ini lebih aktif dan saling mempengaruhi dalam mengidentifikasi mana variabel independen dan variabel dependen.⁴⁸

Objek penelitian ini yaitu pajak air permukaan yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, dan objek ini diungkapkan sebagaimana adanya.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan.⁴⁹ Lokasi penelitian berada di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, yang ber-alamat di Jl Teratai no 10-11 Jember. Dengan alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi tersebut sesuai dengan apa yang penulis akan teliti.

C. Subyek penelitian

Jenis data dan sumbernya akan dijelaskan di sini. Uraian tersebut mencakup semua data yang dapat digunakan sebagai informan atau

⁴⁸ Sugiono, "metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D", (Bandung:2022), 21

⁴⁹ Tim penyusun, Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah (Jember: Iain Jember ,2020), 47

narasumber, dan apa yang dicari.⁵⁰ Karena subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perpajakan air permukaan, penentuan subjek ini dilakukan secara terstruktur:

1. Wajib pajak

Wajib pajak merupakan individu maupun badan yang bertanggung jawab dalam membayar pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak dianggap sebagai wajib pajak, dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak disesuaikan dengan ketentuan undang-undang pajak daerah.⁵¹

2. Petugas pajak

Petugas pajak adalah anggota UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, yang bertanggung jawab untuk menagih pajak air permukaan terhadap wajib pajak.

- a. Ibu Nova Anggraini, A.Md selaku staf tata usaha yang mengelola administrasi penerimaan pajak air permukaan.
- b. Ibu Rahel Setyowati, S.E., M.M. selaku kepala seksi Pendataan dan Penetapan pajak.
- c. Bapak Ifan Hariyadi, S. Sos selaku tim lapangan penagihan pajak air permukaan.

⁵⁰ Ibid, 47

⁵¹ Mardiasmo, "Perpajakan edisi terbaru", (Yogyakarta:2023), 17

D. Teknik pengumpulan data

Bab ini hanya akan membahas teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang tidak terlalu besar.⁵² Pada kasus ini, peneliti dapat melihat proses penerimaan pajak air permukaan secara langsung dengan terjun langsung ke lokasi yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam penelitian. Data yang dicari dalam observasi ini adalah:

- a. Proses Penerimaan pajak air permukaan di daerah Jember.
- b. Kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di daerah Jember.
- c. Hambatan yang dialami oleh UPT Pengelolaan pendapatan daerah dalam melakukan pemungutan pajak air permukaan.

2. Wawancara

Wawancara dikatakan sebagai teknik atau metode dalam pengambilan data di mana peneliti berbicara langsung dengan orang yang diwawancarai untuk menggali informasi mereka. Namun, peneliti

⁵² Sugiono, "metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D", (Bandung:2022), 203

dapat melakukan wawancara melalui media tertentu, seperti telepon atau chat.⁵³ Informasi yang dibutuhkan peneliti berupa:

- a. Informasi tentang Penerimaan pajak air permukaan di daerah Jember.
- b. Kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di daerah Jember
- c. Hambatan yang dialami oleh UPT Pengelolaan pendapatan daerah dalam melakukan pemungutan pajak air permukaan teknik yang digunakan dalam wawancara ini melali secara tatap muka dan melalui media elektronik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui dokumen, atau informasi yang didokumentasikan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen tertulis dan terekam, seperti:

- a. Data mengenai pajak air permukaan
- b. Data mengenai penerimaan Pendapatan asli daerah
- c. Hasil dokumentasi saat dilakukannya wawancara di UPT PPD Jember.

E. Analisis data

Saat pengumpulan data dilakukan, bukan setelahnya, analisis data dilakukan dalam penelitian kualitatif. Pada saat dilakukan wawancara, peneliti melakukan analisis terlebih dahulu terhadap jawaban orang yang

⁵³ Sulyanto, "metode penelitian bisnis", (Yogyakarta:2018), 164

diwawancarai. Jika hasilnya tidak memuaskan, peneliti akan melanjutkan wawancara sampai tahap tertentu. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu:⁵⁴

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan sehari-hari hingga sampai berbulan-bulan. Hal yang pertama dilakukan melakukan pemeriksaan situasi/keadaan objek yang akan diteliti.⁵⁵

a. Reduksi data

Untuk mengurangi jumlah data yang dikumpulkan, peneliti harus merangkum dan terfokuskan pada elemen yang paling penting saat mencari tema dan planya. Hal ini akan membuat pemaparan yang jelas serta memudahkan peneliti dalam melakukan pencarian data tambahan, jika diperlukan.⁵⁶

b. Penyajian data

Data disajikan dengan dilakukannya pengumpulan data-data yang memang benar-benar berkaitan dengan pajak air permukaan dan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat mempermudah peneliti melakukan penelitian.

⁵⁴ Sugiono, "metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D" (Bandung:2023), 321

⁵⁵ Sugiono, 322

⁵⁶ Sugiono, 323

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah terjadi pada penelitian sebelumnya. Hasilnya berupa pemaparan gambar atau deskripsi pada objek sebelumnya yang tidak jelas atau gelap, tetapi setelah diteliti menjadi lebih jelas dan terang.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Maksud dari keabsahan data adalah dilakukannya pengujian data penelitian yang telah dipilih yaitu penelitian kualitatif. Langkah selanjutnya yaitu peneliti menguji validitas data melalui pengecekan ulang pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵⁸

G. Tahap-tahap penelitian

Hal yang perlu dilakukan pada tahap-tahap penelitian yaitu dilakukannya tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.⁵⁹ Berikut penjelasannya:

1. Pra Lapangan

Pra-lapangan proses terdiri dari beberapa tahapan yang juga dilalui oleh peneliti sendiri; tahapan-tahapan tersebut adalah:

⁵⁷ Sugiono, 329

⁵⁸ Sugiono, 368

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018), 137-147.

a. Menyusun Rencana Penelitian

Sebelum dilakukannya penelitian pertama yang harus dilakukan yaitu menemukan objek dan subjek yang menarik untuk diteliti; kedua peneliti juga harus memikirkan dan membuat judul untuk dilakukannya pengajuan terhadap coordinator program studi akuntansi syariah, dan ketiga mulai melakukan penyusunan proposal penelitian.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum dilakukannya penelitian, peneliti harus memilih lokasi. Lokasi penelitian adalah UPT PPD Jember. Memilih lokasi ini karena penerimaan pajak air permukaan selalu melebihi target, meskipun wajib pajak air permukaan masih rendah.

c. Mengurus Perizinan

Penelitian adalah kegiatan yang sifatnya formal, maka dengan begitu peneliti wajib mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum dilakukannya penelitian.

d. Melakukan Survei Keadaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti belum melakukan pengumpulan data yang sesungguhnya. Peneliti hanya berada pada tahap orientasi di lapangan, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu, mereka telah menilai situasi yang ada. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu membaca literatur atau mencari informasi dari informan tentang kondisi dan situasi yang akan diteliti.

e. Memilih Informan

Informan dalam penelitian itu sangat penting karena mereka memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi di lapangan. Peneliti juga harus bisa memilih informan yang memiliki pengetahuan yang luas tentang objek dan subjek yang akan diteliti.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum memulai penelitian, peneliti harus memiliki peralatan yang akan mendukung prosesnya penelitian, seperti alat tulis dan perekam.

g. Etika Melakukan Penelitian

Sangat penting untuk memperhatikan etika dalam penelitian karena baik informan maupun peneliti harus merasa nyaman saat melakukannya. Jika etika penelitian tidak baik, informan tidak akan memberikan data yang diinginkan.

2. Pelaksanaan Penelitian

Tahapan ini dilakukannya kunjungan ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data apa saja yang diperlukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti juga mewawancarai informan sesuai dengan topik penelitian dan dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan.

3. Penyelesaian

Tahapan akhir dari sebuah proses penelitian yang dimaksud peneliti adalah mengolah data yang telah didapatkan serta didiskusikan

bersama dosen pembimbing untuk dilakukannya perubahan sesuai dengan hasil penelitian. Dan laporan telah selesai dan siap untuk diujikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil

Berada langsung di bawah badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unit pelaksana teknis yang menangani kegiatan teknis operasional sebagai penunjang tertentu, dan melakukan bagian dari kewajiban badan dalam bidang teknis kegiatan operasional dalam mengumpulkan pendapatan daerah, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.

Di Jember, pemungutan pajak dan retribusi daerah beroperasi. Area kabupaten Jember seluas 3.293 km², dengan kecamatan terjauh dari pusat kota adalah Sumberbaru di sebelah barat dan Sumerjambe di sebelah timur.

Saat ini, lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember adalah di Jl. Teratai No.10-11, Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

2. Tugas

Dalam hal ini UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam beberapa tugas dari kepala badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. UPT juga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan teknis dalam beroperasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Melakukan Pelaksanaan Pemungutan Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN).
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada KB Samsat.
 - d. Melakukan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota terkait PAD.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala badan.
3. Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember

Dalam upaya mencapai tugasnya, UPT PPD Jember memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

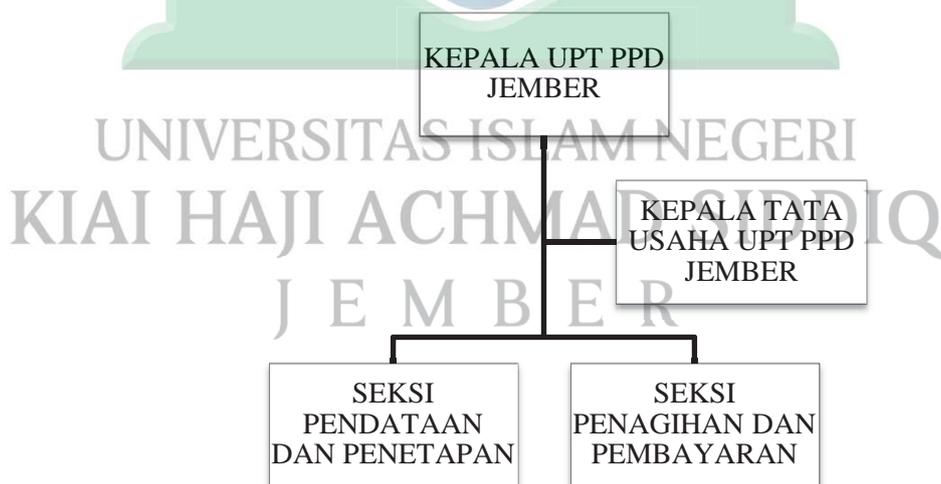
“Terwujudkan masyarakat yang adil, makmur, unggul, dan berakhlak mulia dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif melalui kerja sama dengan semangat gotong royong”.

b. Misi

- 1) Menciptakan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi antar kelompok, sektor, dan wilayah.
- 2) Menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dalam memenuhi kebutuhan, yaitu kesehatan dan penyediaan lapangan kerja dengan mempertimbangkan kelompok yang sudah rentan.

- 3) Untuk menciptakan ruang sosial yang kebhinekaan, dan pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewrgaan.
 - 4) Melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong untuk memastikan bahwa ruang sosial, ruang ekonomi, dan budaya selaras.
4. Struktur Organisasi UPT PPD Jember

Struktur organisasi ini adalah susunan penghubung antar bagian serta posisi dalam organisasi maupun perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi struktur organisasi adalah untuk menjelaskan mengenai uraian tugas, serta wewenang, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi UPT PPD Jember

Dalam struktur organisasi di atas, tugas-tugas yang diberikan

sebagai berikut:

1) kepala unit pelaksanaan (UPT)

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- b. Menjadi sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan petunjuk dan arahan untuk pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pelayanan administrasi umum,
- b. Melakukan pengelolaan dalam hal administrasi kepegawaian,
- c. Melakukan pengelolaan dalam hal administrasi keuangan,
- d. Melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor,
- e. Melakukan kegiatan perhubungan masyarakat,
- f. Melakukan pengelolaan dalam urusan rumah tangga,
- g. Melakukan penyusunan program kerja, program anggaran, dan perundang-undangan,
- h. Melakukan pengarsipan di UPT, dan
- i. Melakukan monitoring

3) Seksi Pendataan dan Penetapan, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran untuk seksi pendataan dan penetapan;

- b. Membuat bahan pendataan dan penetapan objek/subjek pajak dan retribusi daerah di wilayah kerja;
 - c. Membuat bahan dokumen pelaksanaan perpajakan dan retribusi daerah;
 - d. Membuat bahan untuk bagin penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Membuat bahan perhitungan dan proyeksi penerimaan untuk pendapatan asli daerah di wilayah.
- 4) Seksi Pembayaran dan Penagihan, memiliki tugas sebaga berikut:
- a. Membuat rencana kegiatan dan anggaran untuk seksi pembayaran dan penagihan;
 - b. Meneliti dan mengumpulkan bukti pembayaran dari bendahara dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran;
 - c. Menerima dan mengumpulkan surat ketetapan pajak daerah sebagai bahan untuk penagihan;
 - d. Melakukan verifikasi pembayaran pajak daerah; dan
 - e. Melaksanakan Penerimaan, melakukan pembukukan, melakukan penerbitan, dan menindaklanjuti surat-surat perpajakan daerah serta mendistribusikan.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Penerimaan pajak air permukaan disini dapat dilihat dari seberapa banyak penerimaan pajak air permukaan yang ada pada UPT PPD Jember. Perhitungan penerimaan ini dilakukan demi mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dari tahun 2018 hingga 2022. Tujuannya untuk membandingkan antara realisasi penerimaan pajak air permukaan dengan realisasi pendapatan asli daerah. Maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAP}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Setelah mengumpulkan data, hasil presentasinya dicocokkan dengan kriteria kontribusi yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:⁶⁰

Tabel 4.1
Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0.00% -10.00%	Sangat Kurang
10.00% - 20.00%	Kurang
20.00% - 30.00%	Sedang
30.00% - 40.00%	Cukup
40.00% - 50.00%	Baik
> 50.00%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No 690.900.327 tahun 2006 : Kemas Rin Marka, sinomika Journal tahun 2023

⁶⁰ Kemas Rin Marka, Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, *SINOMIKA JOURNAL*, VOL 1 No 6, 2023

Berikut disajikan Perhitungan kontribusi yang dilakukan dengan menggunakan rumus diatas yaitu sebagai berikut:

a. Tahun 2018

$$\frac{542.344.300}{343.022.347.967} \times 100\% = 0,15\%$$

b. Tahun 2019

$$\frac{591.203.550}{360.892.668.675} \times 100\% = 0,16\%$$

c. Tahun 2020

$$\frac{545.694.900}{302.991.840.360} \times 100\% = 0,18\%$$

d. Tahun 2021

$$\frac{566.963.200}{334.575.117.730} \times 100\% = 0,16\%$$

e. Tahun 2022

$$\frac{843.533.850}{354.372.737.708} \times 100\% = 0,23\%$$

Tabel 4.2
Penerimaan PAP terhadap PAD Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	542.344.300	343.022.374.96	0,015%	Sangat Kurang
2019	591.203.550	360.892.668.675	0,16%	Sangat Kurang
2020	545.694.900	302.991.840.360	0,18%	Sangat Kurang
2021	566.963.200	334.575.117.730	0,16%	Sangat Kurang
2022	843.533.850	354.372.737.708	0,23%	Sangat Kurang

Sumber : data diolah

Tabel 4.2 menunjukkan pajak daerah (PAP) terhadap pendapatan asli daerah Jember pada tahun 2018–2022 terus meningkat. Pada tahun 2018 pajak daerah berkontribusi sebesar 0,015% dari PAD Jember,

kemudian pada tahun 2019 kontribusi pajak daerah meningkat menjadi 0,016% dari PAD Jember, dan terus meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,018% kontribusi pajak daerah Terhadap PAD Jember, lalu ditahun 2021 terjadi penurunan kontribusi menjadi 0,016% dari PAD yang ada, namun ditahun 2022 terjadi peningkatan persentase kontribusi sebesar 0,7% dari tahun 2021 menjadi 0,23%. Secara keseluruhan persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masuk dalam kategori sangat kurang.

Namun hasil perhitungan diatas disanggah oleh pihak UPT PPD Jember karena menurut pihak yang bersangkutan pajak air permukaan disini sudah sangat berkontribusi karena jika tidak ada pajak air permukaan mungkin saja hasil dari pajak yang sudah ditarget/ditetapkan oleh peraturan gubernur tidak akan tercapai. Beberapa argumen yang disampaikan oleh pihak fiskus yang bertugas sebagai berikut:

- a. Ibu Rahel Setyowati selaku kepala bagian pendataan dan penetapan,
mengungkapkan

“sebenarnya penerimaan dari pajak air permukaan sudah sangat berkontribusi dek, soalnya kalo tidak ada pajak air permukaan di sini bisa jadi UPT tidak dapat memenuhi target dek, ya memang untuk air permukaan disini masih kecil ya, tapi untuk penerimaannya itu sudah cukup besar dek”.

- b. Bapak Ifan selaku tim lapangan pajak

“untuk kontribusinya disini sebenarnya sudah baik dek, hanya saja masih ada perusahaan-perusahaan yang nakal yang tidak mau mendaftarkan perusahaannya ke kami jadi kami bekerja sama dengan tim SDA yang bertanggung jawab atas dilakukannya sidak langsung, dan sidak ini bertujuan untuk menegur perusahaan seperti ini, kalo mereka kekeh tidak mau mendaftar dengan jangka

waktu satu bulan terpaksa kami segel perusahaannya dan tidak boleh beroperasi sampai mendapatkan surat izinnya”.

c. Ibu Nova selaku petugas administrasi pajak air

“kontribusi pajak air permukaan disini sudah sangat baik dek, karena dari setiap perusahaan yang terdaftar disini sudah patuh dan sadar akan kewajibannya, dan pembayaran pajak airnya juga disesuaikan dengan seberapa banyak air yang digunakan oleh perusahaan tersebut, untuk yang terlambat kami kenakan denda dek sebanyak 1% dari besaran airnya, dan untuk perusahaan yang belum terdaftar kami melakukan teguran melalui surat SP 1 kalau belum jera SP 2 sampai akhirnya dilakukan penutupan paksa bagitu dek”

Pada hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa terkait penerimaan pajak air permukaan sudah berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah karena dalam catatan penerimaannya pajak air permukaan selalu mengalami peningkatan. Hanya saja jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sendiri masih tergolong sangat kurang hal ini dikarenakan penetapan anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur untuk daerah jember masih tergolong kecil.

Sebelum terjadinya penerimaan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember terdapat beberapa prosedur penetapan dalam pencatatan penerimaan atas pengenaan pajak tersebut:

a. Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini akan dikirimkan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban perusahaan tersebut. Untuk penetapan besaran yang

akan dibayar disesuaikan dengan peraturan penggunaan air yang telah ditetapkan pada peraturan gubernur 68 tahun 2017.



Gambar 4.2 SKPD

b. Dokumen Bukti Pembayaran

Bukti pembayaran ini akan diserahkan oleh pihak UPT kepada perusahaan yang telah melakukan pembayaran kewajibannya terhadap UPT PPD Jember.



Gambar 4.3 Bukti Pembayaran

c. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan

Dokumen tanda bukti penerimaan ini akan dijadikan sebagai laporan kepada badan perusahaan yang telah melakukan pembayaran dan diterima oleh UPT PPD Jember.



Gambar 4.4 Bukti Penerimaan

2. Strategi yang dilakukan oleh UPT dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Air Permukaan

Tingkat penerimaan pajak air permukaan sudah optimal dalam hal penerimaan, tetapi belum optimal dalam hal kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan begitu penerimaan pajak air permukaan tersebut dapat didorong dengan adanya beberapa strategi yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember untuk meningkatkan penerimaan pajak air permukaan, sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Langkah ini merupakan terobosan strategi yang diperlukan dalam meningkatkan peneledapan pajak air permukaan, karena hal ini merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai kondisi di lapangan. Pelaksanaan ini diperlukan karena sektor air permukaan perlu dievaluasi karena masih banyak instansi yang belum mempunyai surat ijin.

“strategi yang bisa dilakukan oleh kami ya evaluasi dan monitoring bersama dengan PSDA karena dalam pemantauan ini masih dibawah ranahnya dispenda pusat, jadi kami hanya

melakukan pendampingan dan penagihan sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan dispenda pusat”⁶¹

Pada hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak UPT PPD Jember berada dibawah ranah Dispenda pusat, dan UPT PPD Jember hanya berwenang menjadi fiksus (petugas pajak) yang melakukan penagihan di daerah yang telah ditentukan.

b. Sosialisasi

Salah satu cara untuk mendorong masyarakat untuk taat pajak adalah melalui sosialisasi. UPT PPD Jember juga menyampaikan bagaimana administrasi pajak air permukaan dilakukan sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam pembayaran di UPT PPD Jember. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Rahel Setyowati selaku Kepala seksi Pendataan dan Penetapan, sebagai berikut:

“sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam menggunakan pemanfaatan air tersebut, tetapi juga masih ada instansi yang belum memiliki surat ijin, jadi sosialisasi disini juga menjelaskan bagaiman proses awal yaitu mengurus surat ijin, kemudian ditetapkan, dan instansi terkit memiliki surat ijin. Dan disini juga dijelaskan bagaimana alur pemabyarannya”⁶²

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan membantu wajib pajak menggunakannya.

⁶¹ Ifan Hariyadi, diwawancara oleh penulis, jember, 26 agustus 2024.

⁶² Rahel setyowati, diwawancara oleh penulis, jember, 22 agustus 2024.

c. Penyuluhan Dan Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Sumber pendapatan pemerintahan daerah yaitu Pajak air permukaan ini merupakan sumber pendapatan yang penting, tetapi masih banyak perusahaan yang belum mendapatkan surat izin penggunaannya. Oleh karena ini dengan adanya penyuluhan ini bertujuan untuk berkoordinasi baik dengan antar instansi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannya yaitu melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran pajak ke UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Rahel selaku Kepala seksi pendataan dan penetapan yang disampaikan sebagai berikut:

“Melakukan penyuluhan dan kerjasama dengan instansi terkait itu perlu, karena banyak perusahaan yang belum berizin dalam pemanfaatan air permukaan di daerah jember sendiri”⁶³

Pernyataan diatas diperkuat oleh mbak Nova selaku staf administrasi dibagian tata usaha, sebagai berikut:

“Dalam penyuluhan itu kita selalu didampingi oleh Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA), dari sana kita tau mana perusahaan yang sudah berizin atau tidak, karena adanya penyuluhan ini kita bisa mengupayakan perusahaan yang melakukan pemanfaatan itu sadar akan kewajibannya”.⁶⁴

Seperti yang dijelaskan di atas, UPT PPD Jember juga melakukan pelatihan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak air permukaan dan pendapatan asli daerah.

⁶³ Rahel setyowati, diwawancara oleh penulis, jember, 22 agustus 2024.

⁶⁴ Nova Anggraini, diwawancarai oleh penulis , jember 29 agustus 2024.

C. Pembahasan Temuan

Pada Bab ini peneliti memberikan gagasan terkait kategori dan dimensi, dimana posisi temuan dengan penjelasan dari temuan yang diungkapkan dari lapangan.⁶⁵ Hasil dari temuan peneliti mengenai Kontribusi dan strategi dalam penerimaan, pengambilan dan pemanfaatan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. Diharapkan dalam pembahasan ini dapat memberikan pemahaman berguna dalam menunjukkan relevansi temuan yang lebih luas.

1. Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Dari penelitian diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dari tahun 2018 hingga 2022 selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dari hasil persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Namun, pandemi COVID-19 menghentikan perekonomian pada tahun 2021 dan menyebabkan penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi penelitian di atas menunjukkan bahwa, setiap tahun target dan realisasi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah telah menunjukkan peningkatan. Walaupun pajak air permukaan menerima

⁶⁵ Tim penyusun, Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah (jember: Iain Jember ,2020), 94

jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan pajak lainnya, namun kontribusi pajak air permukaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sudah cukup baik sehingga kontribusi pajak air permukaan sudah efektif dalam penerimaannya, namun masih kecil jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak asli daerah itu sendiri.

Pada penelitian Gheta yaitu Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari 2013-2017 juga mendukung hasil penelitian ini, dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD rendah.⁶⁶

2. Strategi yang dilakukan oleh UPT dalam meningkatkan Penerimaan pajak air Permukaan

Pada proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT PPD Jember telah menerapkan beberapa pendekatan untuk meningkatkan penerimaan pajak air permukaan dan Pendapatan Asli Daerah.

a. Monitoring dan Evaluasi

Dari hasil temuan peneliti melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dapat dikatakan bahwa strategi pertama yang dilakukan UPT PPD Jember yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini ditemukan persamaan dengan strategi yang dilakukan oleh Sri Susanti

⁶⁶ Gheta (2020) "Analisis Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sikka tahun 2013-2017", *Jurnal Ekonomi*, vol.16, No.1, <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i1.344>

Widyawati yang menjelaskan tentang strategi monitoring dan evaluasi.⁶⁷

b. Sosialisasi

Dari hasil temuan peneliti melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dapat dikatakan bahwa strategi yang kedua dalam meningkatkan penerimaan pajak air permukaan adalah dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan ke instansi terkait dan menggunakan media sosial yaitu instagram dan facebook. Hal ini ditemukan persamaan dengan penelitian Silvia Maulida yang menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi.⁶⁸

c. Penyuluhan Dan Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Hasil penelitian melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dapat menunjukkan bahwa langkah selanjutnya adalah memberikan instruksi dan bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Perum Perhutani, PDAM, dan perkebunan lainnya, untuk mempertimbangkan masalah untuk pemecahan atau penyelesaian masalah pajak air permukaan. Ini dilakukan untuk menambah penerimaan pajak air permukaan. Penelitian ini juga terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Eny Asmarita, yang mengatakan bahwa

⁶⁷ Widyasari, Sri Susanti, Marini Manukorong, Dwikora Harjo, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 5, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2754>

⁶⁸ Silvia Maulida, Amor Marundha, dan Uswatun Khasanah, "Akses Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 3, 2023

penyuluhan dilakukan untuk membuat orang belajar bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.⁶⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁹ Eny Asmarita, "Strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan sector pajak di kota samarinda", *Journal Pemerintahan*, vol.6, No. 2, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/Eny%20Asmarita%20\(07-30-18-02-14-49\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/Eny%20Asmarita%20(07-30-18-02-14-49).pdf)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini yaitu kontribusi penerimaan dan strategi penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan daerah, di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah efektif namun hasil dari perhitungan realisasi pendapatan asli daerahnya saja masih kurang efektif. Hal ini dapat diperkuat dengan memperhatikan hasil perhitungan dan persentase di atas. Dan terdapat permasalahan dalam penerimaan yang disebabkan masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaannya kepada instansi walaupun sudah melakukan pemanfaatan air terhadap usahanya
2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember memiliki beberapa strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu: Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi, dan Penyuluhan Dan Koordinasi Dengan Instansi Terkait. Dengan adanya strategi-strategi tersebut pendapatan pada sector pajak air permukaan dapat meningkat.

B. Saran

Dalam penelitian telah dilakukan penganalisaan terhadap penelitian ini dan terdapat beberapa rekomendasi dan saran yang dibuat oleh peneliti:

1. Dalam kontribusi penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan PAD tersebut sebenarnya sudah bagus, akan lebih baik jika instansi yang belum melakukan pendaftaran mendapatkan sanksi akan kelalaian dalam melakukan kewajibannya yang sudah melanggar peraturan gubernur Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk strategi yang sudah dilakukan lebih baik pihak UPT lebih memperluas mengenai sosialisasi kepada masyarakat terutama terhadap instansi yang menggunakan air permukaan untuk menghindari kelalaian wajib pajak dalam pembayaran.
3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat memperluas topik penelitian yang dibahas, terutama mengenai penggunaan air permukaan sehingga ditetapkannya pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Quran , 2015
- Anggraeni Pangesti, Niken. “*Pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.*” skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Aprilia Ropah, Tania. Stanly W. Alexander. SyermiS. E. Mintalangi. “Evaluasi penerapan perhitungan , penetapan, dan pembayaran pajak air permukaan pada upt air manado”. *jurnal riset akuntansi* 16. 3. 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/36334/3382>
- Asmarita, Eny.“Strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan sector pajak di kota samarinda”. *Journal Pemerintahan* .6. 2. 2018. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2018/07/Eny%20Asmarita%20\(07-30-18-02-14-49\)](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2018/07/Eny%20Asmarita%20(07-30-18-02-14-49)).
- Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah, Kabupaten Kuningan: 2023.
- Deviana Wiangga, Rahma. Euis Hernawati. “Peranan Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda II Soreang”, *journal of economic and Business Studen*. 1. 2. 2022. <https://journal.piksi.ac.id/index.php/jrebs/article/view/790>
- Eriyanti Pakpahan, Yunita. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Jom Fekon*.vol 2 no 1. 2015.
- Gheta. “Analisis Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sikka tahun 2013-2017”. *Jurnal Ekonomi*. 16.1. 2020. <https://doi.org/10.31967/relasi.v1i6i1.344>
- Hamidah. Junaidi. Novien Rialdy. *Perpajakan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri,2023. https://books.google.co.id/books/about/Perpajakan.html?id=RRe2EAAAQBAJ&redir_esc=y
- Harahap, Devi. “analisis kontribusi dan efektifitas pajak parker terhadap pendapatan asli daerah koya pematangsiantar”, *jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol 6, No1. 2024. <https://doi.org/10.36985/ekuilmomi.v6i1.1103>

- Julaiha, Siti. Aiat Sudraiat. "Analisis Pengawasan Pajak Air Tanah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2018 – 2020". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 3. 3 2023. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.3159.g1510>
- Jam'an, Andi. Rusran. Siti Fatimah Maulana."Potensi Pajak Air Tanah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros," *jurnal ekonomi dan Bisnis*, vol 5, No 1, 2022. <https://doi.org/10.31850/economos.v5i1.1644>
- Kanjuni, Agus. Heru Cahyono. Rizki Apriliawati. "Pengelolaan pasar terhadap Pendapatan asli daerah". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. vol 5, no 1 2024. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur>
- Mardarismo. *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi. 2023.
- Maulida, Silvia. Amor Marundha, dan Uswatun Khasanah, "Akses Pajak, Sosialisasi Pajak,Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. 2. 3. 2023.
- Mauliyah, Nur Ika. Siti Lailatul Maulida. Alfa Syah Barra Afsil Mubarak. Imelda Aprilia. "Upaya Optimalisasi Pajak Air Permukaan melalui Sosialisasi Perpajakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jawa Timur". *jurnal pengabdian masyarakat dan Lingkungan*. Vol 2 no 2. 2024. <http://dx.doi.org/10.30587/jpml.v2i2.6661>
- Mauliyah, Nur Ika. Okta Ayu Lestari. Hilda Aderia Husaini Muhammad Raziv Aulia Effendi. "Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember". *jurnal ekonomi bisnis manajemen dan akuntansi*. Jil.2. No.1. 2023. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i1.108>
- Maura, Yuanitha. Meidy Lieke Karundeng. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan". *journal of economic and Business Studen*, vol 12, No 6 2023. <https://doi.org/10.52644/joeb.v2i6.740>
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2018.
- Nooraini, Afni. & Afif Syarifuddin Yahya. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)". *Jurnal Keuangan Dan ekonomi public*, Vol 5, no 2 2018. <https://doi.org/10.33701/je%20&%20kp.v5i2.416>

- Nurlaela, Fuji. Dan Hernawati, Euis. “Pengaruh Pajak air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi Periode 2018-2022”. *journal of economic and Business Stude*, vol 2, No 2. 2023. <https://www.journal.piksi.ac.id/index.php/jeps/article/view/1225>
- P. Leo Soro, Crispim. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Air Permukaan Dan Produk Domestic Regional Bruto Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah” *jurnal ilmu management terapan*, vol 4, No.5 2023. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i5>
- Peraturan Daerah Jawa Timur. <https://bapenda.jatimprov.go.id/p/pembayaran-pap>
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. Nomor 47 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. No 13 tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dan pajak daerah.
- Peraturan gubernur Jawa Timur. No 9 tahun 2010 tentang pajak daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. No 11 tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur, No. 16 Tahun 2001. tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- Pura, Rahman. *Pengantar akuntansi 1*. Jakarta: Erlangga. 2013.
- Putri, Delima., Rismansyah, dan Nurmala. “Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*. 4. 3. 2022. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7866>
- Rin Marka, Kemas. Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, Dan Trend Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Sinomika Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*. Vol 1 no 6. 2023. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA>
- Robi Nawawiyah, Vina. R.Deden Adhianto. (2023) “Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Bapenda P3DW Rancaekek” *journal of economic and Business Studen*. 2. 2. 2023. <https://journal.piksi.ac.id/index.php/jeps/article/view/1227>

- Safitri, Ninda. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Perpajakan Serta Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan”. Skripsi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Perbanas Surabaya . 2018.
- Saputri Listiani, Wulan. “Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bapenda Cikokol Tahun 2019-2021”, *jurnal Ilmu administrasi Publik*. 2. 5. 2022. <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i5.2965.g1412>
- Selina Sheren Wowor, Stephanie. “evaluasi penerapan akuntansi pajak air permukaan pada perusahaan daerah air minum kabupaten minahasa utara”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. vol 12 no 1. 2017.
- Sugiono. *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2022.
- Suliyanto. *metode penelitian bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Sukma Mulya, Khas. *Akuntansi Perpajakan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah*. Jember: Iain Jember, 2020.
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Wiangga, Rahma Deviana. Euis Hernawati. “Peranan Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda II Soreang”. *journal of economic and Business Studen*. 1. 2. 2022. <https://journal.piksi.ac.id/index.php/jeps/article/view/790>
- Widyasari. Sri Susanti. Marini Manukorung. Dwikora Harjo. “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 5. 2. 2022. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2754>
- Wijoyo, Dwi Ihsan. “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode 2018-2021”. *Jurnal Ekonomi akuntansi*, vol 1 No 3. 2023 <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i3.424>
- Zalikha, Nur Raihana. “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Dan Kontribusinya Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Tengah” *jurnal kolboratf Sains*. 6. 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKTOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Upt Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Penerimaan Pajak Permukaan Pendapatan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Pajak daerah Pajak air permukaan Penerimaan air permukaan Pendapatan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> kepala seksi Pendataan dan Penetapan Staf Tata Usaha Dokumentasi Buku Skripsi Jurnal Website 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Keabsahan data menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> Triangulasi sumber Triangulasi tekni 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana kontribusi Penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember? Strategi apa yang dilakukan oleh UPT PPD Jember dalam meningkatkan Penerimaan pajak air Permukaan?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Lailatul Maulida
Nim : 2041050300064
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”** adalah hasil karya orisinal saya sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dan disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 September 2024

Saya yang menyatakan



Siti Lailatul Maulida

NIM. 2041050300064

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut merupakan pertanyaan wawancara yang diajukan kepada informan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember:

1. Bagaimana penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di UPT PPD Jember?
2. Strategi apa yang dilakukan oleh UPT PPD Jember dalam meningkatkan penerimaan pajak air permukaan?
3. Adakah kendala yang dihadapi oleh Fiskus UPT PPD Jember dalam upaya meningkatkan PAD dan Penerimaan pajak air permukaan?
4. Strategi apa yang dilakukan oleh UPT dalam meningkatkan Pendapatan Daerah?
5. Adakah layanan khusus yang digunakan dalam pengelolaan pajak air permukaan?
6. Adakah target tersendiri dalam penagihan pajak air permukaan?
7. Bagaimana mekanisme pembayaran dan penagihan Pajak air permukaan?
8. Bagaimana dengan wajib pajak yang sudah lama menunggak dalam pembayaran kewajibannya, apakah masih dilakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak tersebut?

Nomor : B- 008 /Un.22/7 a/PP.00.9/08/2024

06 Agustus 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Jl. Teratai No. 10-11, Kaliwates, kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

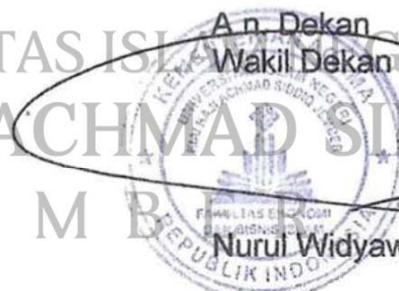
Nama : Siti Lailatul Maulida
NIM : 204105030064
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerimaan, Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER
Jl. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300 e-mail uptbpdjember@gmail.com
JEMBER, 68133

Jember, 7 Agustus 2024

Nomor : 000.1/4926/202.629/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN
di
JEMBER

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jember
Nomor : B-808/Un.22/7.a/PP.00.9/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 perihal
sebagaimana pokok surat dimaksud, maka bersama ini kami sampaikan
mahasiswa berikut :

Nama : Siti Lailatul Maulida
NIM. : 204105030064
Program Studi : Akuntansi Syariah

Di ijinkan untuk mengadakan penelitian pada Kantor
UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER

ISMAWAN TARAMURTI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19691019 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER
Jl. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300 e-mail uptbpdjember@gmail.com
JEMBER, 68133

Jember, 10 September 2024

Nomor : 000.1/5785/202.629/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Penelitian Mahasiswa

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
UIN
di
JEMBER

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jember Nomor : B-808/Un.22/7.a/PP.00.9/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 perihal sebagaimana pokok surat dimaksud, maka bersama ini kami sampaikan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Lailatul Maulida
NIM. : 204105030064
Program Studi : Akuntansi Syariah

Telah melaksanakan Penelitian pada Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jember.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

J E M B E R

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER



ISMAWAN TARAMURTI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691019 199403 1 004

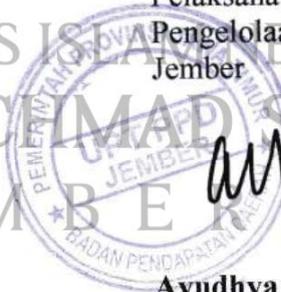
JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	6 Agustus 2024	Menyerahkan surat izin penelitian ke UPT PPD Jember.	
2.	7 Agustus 2014	Menerima surat persetujuan izin penelitian di UPT PPD Jember, pra-wawancara, observasi dan penelitian.	
3.	22 Agustus 2024	Melaksanakan wawancara dengan kepala seksi pendataan dan penetapan.	
4.	26 Agustus 2024	Melaksanakan wawancara dengan fiskus lapangan yang menangani pajak air permukaan.	
5.	29 Agustus 2024	Melaksanakan wawancara dengan staf tata usaha bagian penerimaan pajak air permukaan	
6.	10 September 2024	Menerima surat selesai penelitian di UPT PPD Jember.	

Jember, 10 September 2024

Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Unit
Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pendaptan Daerah
Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACEMAD SIDDIQ
J E M B E R



Ayudhya Haksari, S.E., M.Si.
Nip. 19800719200212 2 002

DOKUMENTASI



Gambar Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember



Wawancara dengan Ibu Rahel Setyowati, S.E
Selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan



Wawancara dengan Mbak Nova Anggraini A. Md
Selaku Petugas Penerimaan Pajak Air Permukaan



Foto Bersama Dengan Petugas UPT PPD Jember

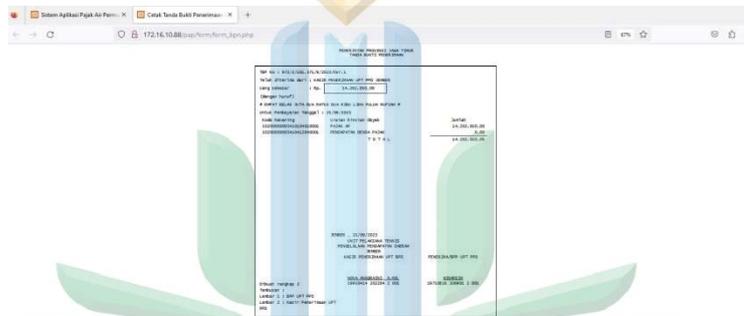


Melakukan koordinasi dengan PSDA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Aplikasi Pelayanan PAP



Bukti Pembayaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : SITI LAILATUL MAULIDA
NIM : 204105030064
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan pendapatan Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 September 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


(Mariyah Ulfah, M.El)
NIP. 197709142005012004



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Lailatul Maulida

NIM : 204105030064

Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 10 September 2024
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah



Dr. Nur Ika Mauliyah SE. M. Ak
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Lailatul Maulida
Nim : 204105030064
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo 14 Mei 2002
Alamat : Blok Masjid Kedungsari Kecamatan Maron
Kabupaten Probolinggo
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Email : Sitilailatulmaulida140502@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Kedungsari 2009-2014
2. MTS Walisongo Maron 1 2014-2017
3. SMAN 1 Gending 2017-2020
4. UIN KHAS Jember

RIWAYAT ORGANISASI

1. PSM UIN KHAS Jember
2. HMPS Akuntansi Syariah 2022-2023
3. DEMA FEBI 2023-2024